

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN DANA PENYESUAIAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh PAD, dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan dana penyesuaian (DID dan BOS) terhadap belanja modal daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman karakteristik dan persebaran daerah yang luas. Pertanyaan menarik adalah apakah peningkatan PAD dan transfer ke daerah dapat mendorong pembangunan regional melalui belanja modal daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *explanatory research*. Analisis regresi melibatkan enam variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, DBH, DID dan BOS serta satu variabel dependen yaitu belanja modal daerah. Data penelitian berasal dari laporan realisasi APBD dan Laporan Keuangan Transfer Ke Daerah tahun 2012-2015. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan hasil yang diperoleh sebesar sembilan sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DBH, DID, dan BOS tidak berpengaruh terhadap belanja modal daerah. Pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran belanja modal yang memadai karena kenaikan PAD, DAU, DBH, DID, dan BOS belum mampu untuk meningkatkan belanja modal daerah. Hasil ini bertentangan dengan *budget theory* yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan *fiscal federalism theory* yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan publik melalui pengelolaan *revenue* dan *expenditure* antar pemerintah. Hasil lainnya dalam penelitian ini adalah DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal daerah. Hal ini sejalan dengan teori *intergovernmental grants* yang menyatakan bahwa transfer antar pemerintah berperan dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar DAK akan semakin besar belanja modal daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian, Belanja Modal.

ABSTRACT

THE IMPACT OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE, BALANCED FUND, AND ADJUSTMENT FUND TO CAPITAL EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA.

This research aims to examine the effect of PAD, balancing funds (DAU, DAK, DBH) and adjustment funds (DID and BOS) to regional capital expenditures. Indonesia has a wide diversity of characteristics and spread of the region. An interesting question is whether increasing PAD and transfers to regions can encourage regional development through regional capital expenditures.

This research uses quantitative approach that is explanatory research. Regression analysis involves six independent variables those are PAD, DAU, DAK, DBH, DID and BOS as well as one dependent variable that is regional capital expenditure. The research data is derived from the realization report of APBD and Transfer of Regional Financial Report to the regions year 2012-2015. Determination of the sample using purposive sampling method with the results obtained by nine samples.

The results show that PAD, DAU, DBH, DID, and BOS have no effect on regional capital expenditure. This result is contrary to the fiscal federalism theory which states that fiscal decentralization is expected to improve public welfare through the management of intergovernmental revenues and expenditures. The results of this research prove that the increase of PAD, DAU, DBH, DID, and BOS has not been able to increase regional capital expenditure. Another result in this research is DAK has positive effect on regional capital expenditure. This is in line with the theory of intergovernmental grants which states that intergovernmental transfers play a role in stimulating the economy and the welfare of society. The greater the DAK, the greater the regional capital expenditure.